

Pelebagaan Partai Politik: Studi Kasus Partai Koalisi Incumbent Dalam Perebutan Kekuasaan Di Pilkada

Dzulkarnain Jamil¹, Ali Maksum², Abdul Rachman Sopyan³, Alfian Huda⁴

Universitas Brawijaya

dzulkarnain@student.ub.ac.id, alimaksum@ub.ac.id, abdulrachmansopyan@ub.ac.id,
alfanhuda085@student.ub.ac.id

Abstract

This research departs from the incumbent's success in maintaining victory in the Regional Head Election (Pilkada) in Probolinggo, East Java. This research aims to reveal the process of institutionalizing political parties by exploring the strength of political parties, the character of political parties, and the internal situation and conditions of political parties. Therefore, this research implements a qualitative methodology with a case study method in the study of political parties. This research found that political parties internally experience institutional weaknesses, this can be seen from the unbalanced division of tasks and responsibilities in running the wheels of the organization because the hegemony of the central board is very visible in policy-making, political parties tend to be pragmatic and opportunistic in the decision-making process because in making considerations negate ideological values, tend to think about the benefits of power and the political position of their administrators so that political parties ignore the principles that are the basis of their struggle. Political parties lack internalization to cadres. This research expands the logic of the failure of political parties in forming party institutions. In party studies, party institutionalization is an effort to strengthen the values/ideology of members and the regeneration process. Institutionalization links two important aspects, namely value infusion (income value) and behavioral routine (actor routine). Value infusion must be a priority for political parties to build legitimacy, acceptance in society, and party rooting. Meanwhile, behavioral routinization must be a major consideration in building political party institutions.

Keywords: Political Parties, Institutions, Ideological Values

Abstrak

Studi ini berangkat dari kesuksesan petahana dalam mempertahankan kemenangan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Probolinggo, Jawa Timur. Penelitian bertujuan mengungkap proses pelebagaan partai politik dengan mengeksplorasi kekuasaan partai politik, karakter partai politik, serta situasi dan kondisi internal partai politik. Maka dari itu, penelitian ini mengimplementasikan metodologi kualitatif dengan metode studi kasus dalam kajian partai politik. Dalam studi ini ditemukan bahwa partai politik secara internal mengalami kelemahan kelembagaan hal ini terlihat dari pembagian tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan organisasi tidak seimbang sebab hegemoni pengurus pusat benar-benar kentara dalam pengambilan kebijakan, partai politik cenderung menjadi pragmatis dan oportunistis dalam proses pengambilan keputusan. Sebab dalam pengambilan pertimbangan

menegasikan nilai-nilai ideologis malah cenderung memikirkan keuntungan kekuasaan dan posisi politik pengurusnya sehingga partai politik mengabaikan prinsip yang menjadi dasar perjuangan mereka. Partai Politik kurang internalisasi pada kader. Riset ini memperluas logika kegagalan partai politik dalam membentuk kelembagaan partai. Dalam kajian kepartaian, pelebagaan partai merupakan sebuah usaha untuk penguatan nilai/ideologi terhadap para anggota, proses kaderisasi Institusionalisasi mengaitkan dua aspek bernilai ialah *value infusion* (nilai pendapatan) serta *behavioral routinization* (rutinitas pelakon). *Value infusion* harus menjadi prioritas partai politik guna mengembangkan legitimasi, penerimaan di rakyat, serta mengakarnya *parpol* (*party rootedness*). Sedangkan *behavioral routinization* harus menjadi pertimbangan utama agar terbangun kelembagaan dalam partai politik.

Kata kunci: Partai Politik, Pelebagaan, Nilai Ideologis

Pendahuluan

Partai politik telah mengalami degradasi dalam membangun demokrasi (Noor, 2016a; Huda and Jamil, 2023). Mereka hanya berjuang demi kepentingan pragmatis dibandingkan menerapkan ideologi yang menjadi arah gerak organisasi (Noor, 2016b, 2018a). Partai politik hanya dijadikan alat untuk kepentingan pribadi dan kelompok, bukan sebagai sarana penyaluran kepentingan masyarakat umum (Noor, 2016a). Hal ini menempatkan partai politik berada di urutan paling bawah, menjadi lembaga yang paling tidak dipercaya oleh masyarakat. Indikator merilis masyarakat yang percaya pada partai politik hanya 61,8% jauh tertinggal dengan lembaga lain seperti Kejaksaan Agung dan TNI yang mencapai 93,3% (Santika, 2023). Burhanudin Muhtadi, selaku peneliti indikator mengatakan pentingnya tingkat kepercayaan pada partai politik mengingat *parpol* memiliki kewenangan yang sangat besar dalam demokrasi di Indonesia. Seperti proses kandidasi Presiden, Kepala Daerah, Ketua KPK, semua membutuhkan kontribusi partai politik (Suryana, 2023). Oleh karena itu hal ini menjadi catatan merah bagi partai politik untuk mengevaluasi diri. Lain halnya dengan Jaringan Aktivistis Kemanusiaan Internasional (JAKI), menyebutkan bahwasanya permasalahan rendahnya kepercayaan publik terhadap masyarakat sipil tidak bisa dilepaskan dari rendahnya kepedulian *parpol* terhadap rakyat (Suryana, 2023).

Sejauh ini studi tentang partai politik cenderung melihat tiga isu utama. Pertama, partai politik dan pilkada. Kedua, partai politik dan persepsi publik. Ketiga, hambatan dan tantangan partai politik. Pertama, hasil penelitian (dalam Fitriyah,

2020) menunjukkan bahwa bagaimana partai politik melaksanakan proses rekrutmen politik untuk pencalonan pilkada ikut menyuburkan politik dinasti. Menggunakan data dari studi literatur, hasil menunjukkan bahwa rekrutmen politik untuk pencalonan pilkada oleh partai politik bersifat sentralistis dan informal, serta menggunakan pertimbangan pragmatis dengan menambahkan syarat kemampuan finansial dan tingkat elektabilitas calon, sehingga lebih memberi jalan bagi calon yang berlatar belakang dinasti. Kedua, hasil penelitian (dalam Efriza, 2019) menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa persepsi publik atas kinerja partai politik sebagai infrastruktur politik masih buruk dan partai politik juga dianggap bertanggung jawab atas masih buruknya kinerja lembaga suprastruktur politik. Ketiga, hasil penelitian (dalam Aji and Indrawan, 2020) menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa meningkatnya kuantitas partai di Indonesia belum sejalan dengan meningkatnya kualitas dari partai politik. Hasil di lapangan menemukan partai meninggalkan ideologinya demi kepentingan pragmatis, merekrut kader hanya memiliki uang dan popularitas. Dari ketiga kecenderungan penelitian di atas tampak bahwa kajian mengenai birokrasi luput dalam melihat pentingnya pelebagaan partai politik. Padahal, kajian tersebut penting untuk memperbaiki partai politik dan menjaga stabilitas untuk melayani kepentingan publik.

Penelitian ini bertujuan melengkapi keterbatasan dari studi yang ada, yang luput melihat pentingnya pelebagaan partai politik dalam peningkatan kinerja organisasi untuk menciptakan kualitas kader yang berintegritas. Mengingat partai politik merupakan elemen fundamental dalam menjaga dan memperkuat sistem demokrasi. Sejalan dengan itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan mengapa peran partai politik menjadi terdegradasi dan tidak dipercaya publik. Hasil penelitian menunjukkan pertama, pengurus partai politik di tingkat cabang/daerah telah hilang kedaulatannya dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, partai politik cenderung oportunistis dan pragmatis. Ketiga, lemahnya internalisasi pada kader. Jawaban atas pertanyaan tersebut memungkinkan diperoleh suatu pengetahuan yang mendalam tentang pentingnya pelebagaan partai politik dalam konsolidasi demokrasi. Pengetahuan ini dapat menjadi

perluasan pandangan bagi para politisi, masyarakat sipil, akademisi, pemangku kebijakan, maupun mahasiswa dalam mengkaji partai politik.

Dominasi pengurus pusat dan ketua umum telah membuat pengurus partai politik di Kabupaten Probolinggo menjadi tidak leluasa dalam menjalankan roda organisasi karena peran yang sangat terbatas. Dewan Pengurus Cabang (DPC) sangat bergantung dan patuh pada instruksi pengurus pusat dalam menentukan keputusan. Hal ini menunjukkan terjadinya kemunduran demokrasi pasca diberlakukannya desentralisasi. Partai politik di daerah yang seharusnya menjadi pilar berdirinya demokrasi, dengan sadar peran dan fungsinya secara kelembagaan dilemahkan. Sehingga, hal ini berimplikasi pada partai politik yang kerap kali mengalami masalah kelembagaan, seperti krisis kader, pragmatisme politik, memudarnya ideologi yang berimplikasi pada partai menjadi kehilangan arah. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk menjawab mengapa ketua umum memiliki kekuasaan yang dominan yang berimplikasi terhadap sistem kelembagaan partai. Mengingat partai politik dapat membantu mengorganisir dan mengartikulasikan berbagai pandangan dan kepentingan masyarakat. Melalui partai, warga negara dapat menyuarakan aspirasi, kebutuhan, dan pandangan mereka, yang kemudian tercermin dalam *platform* dan kebijakan partai (Miftah, Sastrawati, and Anis 2023).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang konteks di mana fenomena tersebut terjadi. Membantu peneliti memahami faktor-faktor sosial, budaya, dan kontekstual yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Selain itu metode kualitatif bersifat fleksibel dan memungkinkan perubahan dalam desain penelitian seiring berjalannya waktu (Matthew B. Miles; A. Michael Huberman, 2014; Hasan *et al.*, 2023). Hal ini dapat membantu dalam pemahaman dinamika sosial dan hubungan antar individu atau kelompok. Memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana dan mengapa interaksi sosial terjadi. Jenis data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder (Sari *et al.*, 2022). Data primer dikumpulkan secara

langsung hasil wawancara dari narasumber. Data ini berasal dari pengamatan langsung dan interaksi dengan objek yang diteliti yaitu para Ketua DPC partai koalisi. Keuntungan dari menggunakan data primer yaitu kontrol yang lebih besar terhadap proses pengumpulan data, kebaruan informasi yang diperoleh, dan kemampuan untuk merancang pertanyaan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Sementara data sekunder yang digunakan berasal dari penelitian terdahulu, seperti dari berbagai sumber, dokumen lembaga pemerintah, jurnal, penelitian sebelumnya, atau sumber lainnya yang mendukung penelitian (Sugiarto, 2015).

Tabel 1

Daftar Informan

No	Nama	Jabatan	Instansi
1.	AR	Ketua DPC	Partai Nasdem
2.	JJ	Ketua DPC	Partai Gerindra
3.	TES	Ketua DPC	Partai PDI-P
4.	SQ	Ketua DPC	Partai PPP
5.	OM	Ketua DPC	Partai Golkar

Sumber: Diolah oleh Peneliti 2024

Teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memilih peserta yang dapat memberikan wawasan mendalam tentang topik penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memasukkan unsur subjektivitas dalam pemilihan sampel, yang dapat berguna dalam situasi di mana penelitian bertujuan untuk memahami perspektif individu atau kelompok tertentu. Sasaran pada penelitian ini adalah ketua umum DPC Partai Nasdem, Gerindra, PDI-P, PPP, dan Golkar, dipilih karena merupakan koalisi partai pengusung petahana yang memegang informasi kunci dan Ketua DPC adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Pada proses pengambilan data peneliti membuat perjanjian dengan narasumber untuk menentukan jadwal wawancara. Dalam proses ini peneliti cukup kesulitan dan

mengalami kendala. Karena, para narasumber yang sulit untuk ditemui dan terkadang secara sepihak membatalkan jadwal yang telah ditentukan. Teknik analisis data yang digunakan teknik analisis data model interaktif meliputi (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data dan (4) penarikan kesimpulan (Miles, Huberman and Saldana, 2014). Untuk menguji keakuratan data di lapangan, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi dipilih untuk mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang valid serta tingkat kepercayaan yang tinggi sehingga tidak ada keraguan pada peneliti untuk memberikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.

Hasil dan Pembahasan

Pelembagaan Partai Politik

Pelembagaan partai merupakan sebuah usaha untuk penguatan nilai/ideologi terhadap para anggota, proses kaderisasi (Jakobi, 2011). Hal ini sangat dibutuhkan untuk menunjukkan eksistensi partai melalui kader yang terjun dan menjadi wakil bagi para partainya di pemerintahan. Pelembagaan partai politik berkaitan dengan proses pengorganisasian serta prosedur buat memperoleh *value* (nilai) serta *stability* (stabilitas) tertentu (Jakobi, 2011; Piñeiro Rodriguez and Rosenblatt, 2020). Sebuah parpol dianggap berhasil apabila mampu memformulasikan dan menginternalisasi nilai-nilai organisasionalnya dalam periode waktu tertentu ada stabilitas di internal partai hingga dapat dipastikan partai tersebut terlembagakan dengan baik (Randall and Svåsand, 2002). Institusionalisasi mengaitkan dua aspek bernilai ialah *value infusion* (nilai pendapatan) serta *behavioral routinization* (rutinitas pelakon) (Randall and Svåsand, 2002). *Value infusion* adalah proses dimana para anggota menggeser fokus dari tujuan serta kepentingan individual yang khusus ke arah tujuan organisasi yang lebih besar. Hal ini akan mengembangkan legitimasi, penerimaan di rakyat, serta mengakarnya parpol (*party*

rootedness). Sedangkan *behavioral routinization*, ialah ketentuan serta norma secara resmi serta informal tertanam di dalam pola-pola kegiatan partai sehingga hendak terdapat prediktabilitas serta reguritas sikap dan ekspektasi dari para anggota, pengurus partai politik, ataupun warga lain (Randall and Svåsand, 2002; Jakobi, 2011; Piñeiro Rodríguez and Rosenblatt, 2020; Rasmussen and Knutsen, 2021).

Selain itu pelebagaan partai dapat dilihat dari aspek internal-eksternal dan aspek struktural-kultural, merupakan kedua aspek yang terkandung dalam proses institusionalisasi yang dapat membentuk empat dimensi jika dipersilangkan, yaitu: Pertama, dimensi kesisteman dalam partai politik. Dimensi kesisteman yang dimaksudkan dengan kesisteman yaitu pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik yang dilakukan menurut aturan, persyaratan, prosedur dan mekanisme yang disepakati dan ditetapkan oleh partai politik dalam Anggaran dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) secara komprehensif. Kedua, dimensi identitas nilai partai politik. Identitas nilai ini berkaitan dengan identitas partai politik berdasarkan ideologi atau *platform* partai, dan berdasarkan basis sosial pendukungnya, dan identifikasi anggota terhadap pola dan arah perjuangan yang diperjuangkan partai politik. Ketiga, dimensi otonomi partai politik. Derajat otonomi suatu partai politik dalam pembuatan keputusan berkaitan dengan hubungan partai dengan aktor luar partai baik dengan sumber otoritas tertentu. Keempat, dimensi pengetahuan publik terhadap partai politik (Randall and Svåsand, 2002). Menunjukkan Derajat pengetahuan publik tentang partai politik yang merujuk pada pertanyaan apakah keberadaan partai politik tersebut telah tertanam pada imajinasi publik. Bila keberadaan partai politik telah tertanam pada imajinasi publik, maka pihak lain baik para individu maupun lembaga akan menyesuaikan aspirasi dan harapan mereka dengan keberadaan partai politik (Randall and Svåsand, 2002; Nasir, 2016; Noor, 2017)

Pilkada

Pilkada merujuk kepada proses demokratis dimana warga suatu daerah memiliki hak untuk memilih kepala daerah mereka, seperti gubernur, bupati, atau walikota, melalui pemilihan langsung (Lay, 2007; Noor, 2018b; Arafat, Sahrin dan Hadi, 2022). Proses ini dilaksanakan untuk menentukan siapa yang akan memimpin dan mengelola pemerintahan di tingkat lokal. Pemilihan Kepala Daerah ini menjadi salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal, dimana warga memiliki hak untuk memilih dan dipilih (Sobari, 2020). Semenjak mengalami perubahan sistematika pemilihan dan dilaksanakan secara langsung, aspirasi rakyat menjadi lebih terserap dan masyarakat bisa menentukan pilihannya sendiri sesuai dengan aspirasi dan hati nurani. Hal ini merupakan buah perubahan dari adanya reformasi untuk membangun kekuasaan yang lebih demokratis, memupuk kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, serta menguatkan kekuasaan bagi orang yang menjabat karena mendapatkan legitimasi secara langsung dari rakyat (Nurhasim, 2018; Haboddin and Damayanti, 2021).

Pilkada memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan dan kepemimpinan di tingkat daerah, sehingga penting untuk dilaksanakan dengan transparan, adil, dan akuntabel (Arafat, Sahrin and Hadi, 2022). Pilkada memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan kepada warga suatu daerah untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi, menentukan pemimpin mereka, serta mempengaruhi arah kebijakan dan pembangunan di tingkat lokal (Wahid, 2017; Sobari, 2020). Penting untuk melaksanakan Pilkada dengan prinsip-prinsip demokratis, termasuk keadilan, transparansi, dan partisipasi yang aktif dari masyarakat. Pemilihan Kepala Daerah ini biasanya diatur oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku di suatu negara, dan sering melibatkan tahapan seperti pendaftaran calon, kampanye politik, debat, dan pemungutan suara. Calon-calon yang ingin menjadi kepala daerah mendaftar untuk bersaing dalam pemilihan, dan warga kemudian memberikan suara mereka untuk memilih calon yang dianggap paling cocok. Pilkada yang baik dapat menjadi pendorong inovasi dan pembangunan di tingkat lokal (Ekowati, 2019).

Sentralisasi Kekuasaan Partai Politik

Partai politik merupakan pilar demokrasi dalam menegakkan kepentingan masyarakat (Khotimah, 2022). Pengelolaan dan pembagian tugas harus seimbang dalam menjalankan organisasi. Hal ini sangat vital melihat tugas partai politik yang tidak mudah. Sehingga pembagian tugas partai politik perlu dilakukan untuk memberikan kebebasan bagi pengurus partai di daerah untuk mengelola wilayah mereka sendiri. Hal ini perlu dilakukan karena sebagai lembaga demokrasi kekuasaan pada partai politik tidak boleh terpusat (Ekawati, 2020). Dengan diberlakukannya pembagian kekuasaan ini dapat mengurangi praktik kesewenang-wenangan pengurus pusat, Dewan Pengurus Cabang (DPC) kembali memiliki kedaulatan, dan urusan politik menjadi lebih cepat dalam menjalankan tugas (Solikhin, 2017; Refani, 2021). Namun demikian, fakta di lapangan yang terjadi di Kabupaten Probolinggo menunjukkan kebalikannya. Peran Dewan Pengurus Pusat (DPP) masih sangat dominan dan sentralistik (Ekawati, 2020). Alhasil Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang tidak memiliki kewenangan yang signifikan meski telah diberlakukan desentralisasi dan otonomi daerah. Model sentralistik yang ditampilkan oleh partai politik tentu saja menjadi ironis yang merugikan proses demokrasi dan bertolak belakang sebagai lembaga yang menopang berdirinya demokrasi. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh ketua umum DPC GERINDRA salah satu narasumber yang kami temui di lapangan.

“Saat kita akan menentukan keputusan, kami di sini mengikuti arahan pusat. Bagaimana mau mereka, kami tegak lurus dengan ketua umum. tidak berarti apa yang sudah kita putuskan di cabang otomatis akan dikabulkan oleh pusat. Meskipun nama calon sudah keluar. Kemarin kita merapat karena memang tidak ada kader kami yang mampu untuk maju kesana, hal itu sudah biasa dalam politik, sehingga keputusannya mendukung pasangan petahana.”

Keputusan pengurus pusat yang mutlak dan sentralistik menjadi preseden buruk bagi perkembangan kerangka politik di daerah. Wajar jika partai politik nyaris tidak menghasilkan kader yang potensial, karena belum dibangun sistem persaingan yang sehat bagi kader partai (Aji, 2020; Refani, 2021; Gunawan, 2018; Hakim,

2023;). Selain kesulitan melahirkan berkualitas, kondisi ini bisa membunuh kader dalam hal loyalitas. Kader-kader partai akan cenderung pragmatis dan berpindah-pindah partai di tengah ketidakpastian karir politiknya. Jika kondisi tersebut dicermati secara seksama, terlihat bahwa pengurus partai di Kabupaten Probolinggo tidak memiliki kekuatan untuk mengajukan calon-calon pemilihan (Kandidasi) yang berlangsung di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Semua keputusan sangat tergantung pada pusat, daerah tinggal melaksanakan, sekalipun bertentangan dengan aspirasi daerah. Praktik semacam ini kerap kali mengganggu kondusifitas internal partai politik dan tak jarang berakhir konflik. Fakta ini sangat mengkhawatirkan, dan perlu evaluasi untuk meningkatkan kualitas kemandirian partai politik di daerah. Sebab kekuasaan yang sentralistik bisa berdampak buruk pada partai politik yang berpotensi mengalami krisis kepemimpinan. Perlu adanya pembagian kekuasaan serta pelibatan semua anggota dalam pengambilan keputusan.

Oportunis dan Pragmatisme Partai Politik

Masalah pelembagaan partai politik, membuat mereka menjadi oportunis dan mengambil tindakan atau keputusan berdasarkan keuntungan politik daripada nilai atau ideologi yang menjadi landasan dalam berjuang. Partai politik kehilangan konsistensi ideologis dan memilih keputusan yang dianggap paling memungkinkan untuk memenangkan pemilu atau mendapatkan dukungan politik, tanpa mempertimbangkan nilai atau ideologi yang mendasari mereka. Seringkali, partai politik mengubah posisi politiknya untuk mendapatkan dukungan yang lebih luas. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi politik dapat dirusak oleh sikap oportunis partai politik. Beberapa partai mungkin melihat oportunisme sebagai strategi yang diperlukan untuk bertahan atau mencapai tujuan politik. Namun, praktik ini sering dikritik karena dianggap tidak konsisten dan mengabaikan prinsip-prinsip yang dipegang oleh kader. Dalam waktu singkat, partai menjadi lebih mudah bergerak maju. Tidak adanya kesepakatan antara beberapa faksi partai menyebabkan perpecahan internal. Dalam jangka pendek, posisi partai politik dalam implementasi kebijakan cenderung mengikuti kepentingan kekuatan politik yang berkuasa. Hal ini

diperkuat dengan temuan lapangan kami, yang disampaikan oleh Ketua Umum DPC PPP

“Dalam politik yang kita lihat adalah potensi kemungkinan menangnya besar, kemarin petahana ini dari hasil berbagai survei selalu ada paling atas. Komunikasi yang terjalin juga bagus sehingga kami memutuskan untuk mendukungnya meski secara corak ideologi berbeda.”

Sebuah partai dapat kehilangan identitasnya jika tidak berkomitmen pada prinsip dan nilainya, yang membuat pemilih kesulitan memahami *platform* dan tujuan partai. Jika partai politik pragmatis terlalu sering mengubah pendirian mereka untuk kepentingan politik jangka pendek, mereka akan kehilangan kepercayaan pemilih. Ini dapat merusak kredibilitas partai dan citra politik secara keseluruhan. Model organisasi kepartaian semakin tidak jelas. Hal ini berdampak pada pergerakan orientasi partai politik, sehingga tampak bahwa aktivitas partai politik hanya terjadi menjelang pemilu. Tidak ada respons yang cukup dari partai politik terhadap masalah yang sedang dihadapi. Ini menghasilkan kritik dan kekecewaan masyarakat, karena partai politik secara pasif tidak memperhatikan atau memahami kebutuhan pemilih, sehingga partisipasi pemilih dapat menurun. Ini dapat menyebabkan masyarakat menjadi tidak percaya politik dan ambivalensi. Partai politik dan masyarakat semakin jauh dari satu sama lain, karena masyarakat percaya bahwa partai hanya mementingkan diri sendiri dan tidak mempertimbangkan kebutuhan umum.

Lemahnya Internalisasi Pada Kader

Kader partai menghadapi banyak masalah karena kelemahan internalisasi partai politik. Hal ini dapat menjadi hambatan yang signifikan dalam menciptakan fondasi yang kuat untuk mencapai tujuan partai. Karena kaderisasi yang baik adalah kunci keberlanjutan dan kelangsungan partai. Internalisasi penanaman nilai pada kader memberikan informasi penting sebagai pesan ideologis untuk menentukan kualitas organisasi. Untuk menentukan keberpihakan, identitas partai termasuk cara partai menetapkan kebijakan dan masalah. Hal ini penting karena partai harus memiliki kekuatan untuk menarik pemilih. Oleh karena itu, tujuan perjuangan setiap partai politik di Kabupaten Probolinggo tidak jelas, dan sulit untuk

membedakan antara satu partai dengan yang lainnya. Karena mereka tidak lagi mempertimbangkan masalah ideologis, partai politik menjadi sangat pragmatis. Debat ideologi semakin rumit dan tidak jelas. Selain itu, fondasi ideologi menjadi semakin tidak relevan oleh elit partai karena mereka semakin berkonsentrasi pada mendapatkan kekuasaan dan memenangkan pemilu.

Sebagai bagian penting dari demokrasi, partai politik seharusnya memiliki peran yang sangat penting, seperti memilih calon pemimpin baik di tingkat lokal maupun nasional. Oleh karena itu, partai politik harus memiliki praktik rekrutmen dan internalisasi kader yang efektif. Namun, partai politik mengalami transformasi besar. Tidak mungkin bagi partai politik di Kabupaten Probolinggo untuk menerapkan pola pengangkatan dan kaderisasi yang efektif. Internalisasi adalah bagian penting dari organisasi karena membantu orang tumbuh menjadi individu yang baik dan memiliki kemampuan untuk menggerakkan orang lain dengan baik, mempersiapkan mereka untuk menjadi pemimpin di masa depan. Namun, politik kekerabatan dan proses internalisasi kader yang instan terus mempengaruhi partai politik. Akibatnya, banyak anggota partai yang tidak memahami bagaimana organisasi harus bergerak. Karena partai politik hanya aktif ketika mendekati pemilu, mereka mengalami krisis kader yang berkualitas di Kabupaten Probolinggo. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan salah satu narasumber kami.

“Pertama masih belum ada kader yang dianggap bisa menyaingi petahana ini, dan hal ini sudah biasa dalam partai politik. Belum mumpuni untuk menjadi rival atau musuh dari petahana maka pertimbangannya ya harus berkoalisi. Soalnya hitung-hitungan politisnya kan menang dan kalah. Pertimbangan yang pertama ini memang kan dari petahana ini kuat. Sebagian besar parpol kemarin berkoalisi, karena mungkin memang tidak ada kader yang mampu menyaingi, tanpa diusung partai koalisi, diusung partai sendiri pun dia masih bisa mencalonkan sendiri, sedangkan yang lain tidak bisa, kecuali harus berkoalisi.”

Diskusi

Akibat dari dominasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dalam proses pemilihan calon kepala daerah, keinginan kader di tingkat DPC dan DPD sering diabaikan. Sebagai hasil dari dominasi elit partai di tingkat pusat, yang bersifat *top down*, pengurus partai lokal hanya dapat menjaring suara tanpa memiliki kekuatan untuk membuat keputusan. Pada akhirnya, strategi politik di tingkat pusat mencapai kesepakatan untuk mendukung salah satu calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pemilukada Kabupaten Probolinggo. Dalam proses ini, pengurus partai di daerah harus mendukung calon yang dipilih oleh pengurus pusat, meskipun mereka mungkin juga mendukung calon lain yang berkompetisi. Melihat situasi ini, tampak bahwa partai politik di daerah, tidak memiliki wewenang untuk memilih calon atau kandidat untuk kepala daerah dalam Pilkada provinsi, kabupaten, atau kota. Semua keputusan sangat bergantung pada pusat dan daerah hanya tinggal menjalankan, bahkan jika itu bertentangan dengan keinginan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa partai politik memiliki hegemoni dan sentralisasi kekuasaan dalam pengambilan keputusan.

Preseden yang tidak baik untuk pertumbuhan kader politik di daerah adalah keputusan DPP partai politik yang sangat sentralistik dan absolut. Karena tidak ada sistem kompetisi yang adil untuk kader partai, wajar jika partai politik tidak memiliki banyak kader berkualitas. Kondisi ini dapat membahayakan loyalitas dan karier politik kader di daerah serta menggagalkan pembentukan kader yang berkualitas. Kader yang berpindah partai menunjukkan kekecewaan mereka terhadap sistem politik internal partai dan ketidakjelasan karir politik mereka. Partai politik mengadopsi pendekatan sentralistik, yang tentunya menjadi ironi dan mungkin juga tidak berguna untuk proses demokrasi yang terus dipromosikan oleh pemerintah hingga tingkat terendah. Partai politik yang selama ini bersemangat untuk mendukung demokratisasi tidak melakukan desentralisasi atau pelimpahan wewenang, yang merupakan komponen penting dari demokrasi. Struktur partai politik tidak memungkinkan proses pelimpahan wewenang dari pengurus di tingkat pusat ke pengurus di tingkat daerah. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip

dasar demokrasi, yaitu rakyat memiliki kedaulatan. Sebagai konstituen pemilih yang memperjuangkan hak politiknya melalui partai politik, kader-kader partai di daerah tidak memiliki ruang yang cukup untuk melaksanakan tanggung jawab partisipatif mereka.

Proses pelembagaan partai politik yang tidak sempurna membuat dinamika Pilkada di Kabupaten Probolinggo menjadi sangat cepat. Saat membentuk koalisi, ideologi partai politik tidak lagi didasarkan pada politik. Kesetiaan terhadap satu partai politik atau fanatisme ideologis bukanlah ciri pragmatis politik yang memungkinkan setiap individu atau kelompok untuk menetapkan tujuan politiknya berdasarkan kepentingan semata-mata mereka sendiri. Koalisi partai yang terbentuk sangat tidak stabil dan tidak teratur. Tidak selamanya partai yang berbasis agama akan berkoalisi dengan partai yang berbasis agama pula, bahkan partai politik yang memiliki ideologi yang berbeda tiba-tiba bergabung dalam koalisi yang sama. Problem ini masih harus ditambah dengan masalah konsolidasi internal partai, di mana konflik horizontal dan vertikal sering terjadi. Meskipun demikian, partai politik memainkan peran yang signifikan dalam proses pengisian jabatan publik dan pemilihan pemimpin. Diutamakan untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan kinerja sistem politik. Dalam hal kegiatan bernegara, partai politik seharusnya berjuang untuk prinsip dan kepentingan konstituen yang diwakilinya saat menentukan kebijakan.

Proses koalisi dan calon yang diajukan menunjukkan pragmatisme. Dengan memanfaatkan figur dan elektabilitas calon yang akan diusung, partai menggunakan pertimbangan pragmatis. bukan anggota kader yang telah diuji di dalam partai yang terlibat dalam Pilkada. Orang-orang yang populer atau memiliki banyak elektabilitas dapat digunakan sebagai sumber daya dalam pencalonan Pilkada. Ideologi partai tidak lagi diperjuangkan, dan tidak lagi memainkan peran penting dalam proses pembentukan koalisi. Ini terbukti ketika partai PPP, yang berbasis islam, memilih untuk bergabung dengan koalisi besar dengan Nasdem, Gerindra, PDIP, dan Golkar, yang secara ideologis berbeda. Keputusan PPP untuk tidak bergabung dengan koalisi PKB dan Demokrat menunjukkan bahwa kesamaan nilai bukan alasan utama untuk

bergabung. Partai politik seharusnya berfungsi sebagai sarana untuk menghasilkan kader yang berkualitas untuk dicalonkan dalam pemilihan, daripada bertindak pragmatis dengan mencalonkan pasangan yang hanya bergantung pada popularitas dan mengumpulkan dana yang kuat, tetapi berasal dari luar partai politik, yang mengakibatkan kehilangan kepercayaan masyarakat.

Melihat bagaimana partai politik bergerak selama Pilkada menunjukkan betapa pentingnya perbaikan kelembagaan. Secara garis besar, banyak masalah yang dihadapi partai politik terkait dengan internalisasi ideologi dan kader partai yang semakin lemah. Seolah-olah partai politik secara sengaja menggabungkan tugas-tugasnya. Akibatnya, kegagalan untuk menjalankan tugas-tugas mereka dengan cara yang paling efektif berdampak negatif pada pelaksanaan demokrasi secara keseluruhan, terutama di tingkat lokal dan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa partai politik belum memenuhi fungsi dan peran yang diharapkan dari mereka dalam masyarakat. Sebenarnya, partai politik adalah infrastruktur politik di mana para pemimpinnya harus menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, partai politik dapat dianggap sebagai parameter demokrasi itu sendiri. Dalam hal demokratisasi di Indonesia, terutama dalam hal pemilihan kepala daerah, di mana proses pemilihan secara langsung oleh rakyat digunakan, proses demokratisasi harus sejalan dengan cara pilkada dilakukan dan pemilihan calon kandidat dalam partai politik. Mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk menciptakan demokrasi prosedural, tetapi mereka juga bertanggung jawab untuk menjamin bahwa demokrasi yang substansial berlangsung.

Oleh karena itu, internalisasi ideologi pada kader partai politik akan menjadi prinsip dan pegangan yang akan digunakan oleh pengurus dan kader partai dalam melaksanakan program dan aktivitas politik di masyarakat. Selain itu, ideologi menjadi posisi politik partai politik saat berbicara tentang berbagai masalah kemasyarakatan. Dari perspektif kebijakan publik, ideologi juga mempengaruhi pendirian partai politik terhadap kebijakan yang direncanakan. Selanjutnya, yang paling penting adalah ideologi partai politik menjadi daya tarik bagi pemilih untuk membuat keputusan mereka berdasarkan pandangan yang mereka percaya. Dengan

demikian, masalah kaderisasi yang signifikan dapat dihindari, seperti kekerabatan politik yang kuat, banyaknya mahar politik, dan kecenderungan partai politik untuk memasukkan orang dari luar organisasi atau non-parpol dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, mengurangi kemungkinan kandidat pragmatis muncul tanpa proses pengenalan rekam jejak dan uji kompetensi dan analisis program.

Kesimpulan

Partai politik merupakan pilar demokrasi, ketika partai politik menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, kualitas demokrasi akan meningkat. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa partai politik secara internal mengalami kelemahan kelembagaan. Penelitian menunjukkan bahwa pengurus partai politik di tingkat cabang dan daerah kehilangan autonomi mereka dalam proses pengambilan keputusan. Dua, partai politik cenderung menjadi pragmatis dan oportunis, sehingga mereka mengabaikan prinsip yang menjadi dasar perjuangan mereka. Ketiga, mereka kurang internalisasi pada kader mereka. Hal ini harus menjadi perhatian penting dalam kehidupan bernegara karena partai politik yang kuat akan berfungsi sebagai alat demokrasi yang dapat secara signifikan meningkatkan kualitas politik baik di tingkat lokal maupun nasional. Partai politik harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan proses rekrutmen politik yang memungkinkan anggota masyarakat dari berbagai latar belakang untuk berpartisipasi dalam proses pengangkatan jabatan politik melalui proses yang demokratis dan selektif. Ketua umum tidak memiliki semua kekuasaan, dan pengurus cabang memiliki otoritas untuk mengatur daerah sesuai keinginan kader. Jadi, secara ideal, proses ini akan mempengaruhi perkembangan organisasi partai politik.

Daftar Pustaka

- Aji, M. P. & Indrawan, J. (2020) Hambatan dan tantangan partai politik: Persiapan menuju pemilihan umum 2024. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 8(2), pp. 214–229.
- Arafat, Y., Sahrin, A. & Hadi, A. M. (2022). Pilkada Antara Pertarungan Gagasan Dan Perebutan Kekuasaan. *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 8(2), pp. 22–35.
- Efriza, N. (2019). Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik [The Existence of The Political Parties in Public Perception. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 10(1), pp. 17–38. Available at: <https://doi.org/10.22212/jp.v10i1.1314>
- Ekawati, E. & Sweinstani, M. K. D. (2020). Dampak Personalisasi Partai Terhadap Demokrasi Internal Partai Di Indonesia Pasca Orde Baru. *Jurnal Wacana Politik*, 5(2), pp. 111–123.
- Ekowati, E. Y. (2019). Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan dan Calon Tunggal dalam Pilkada. *Jurnal Transformative*, 5(1), pp. 16–37.
- Fitriyah, F. (2020). Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11(1), pp. 1–17.
- Haboddin, M. & Damayanti, R. (2021). Partisipasi Kontestan Dalam Pilkada Kabupaten Malang. *KYBERNAN: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 12(2), pp. 61–70.
- Hakim, L. (2023). *Dominasi Ketua Umum Sebabkan Partai Politik Krisis Kepemimpinan, Antara Jabar*. <https://jabar.antaraneews.com/berita/433293/dominasi-ketua-umum-sebabkan-partai-politik-krisis-kepemimpinan?page=all> (Accessed: 13 March 2023).
- Hasan, M. et al. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Penerbit Tahta Media [Preprint].
- Huda, A. & Jamil, D. (2023). Degradasi Demokrasi Lokal: Studi Kasus Politik Dinasti Kota Batu, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), pp. 5161–5171.
- Jakobi, A.P. (2011). Political Parties and The Institutionalization of Education: A Comparative Analysis of Party Manifestos, *Comparative Education Review*, 55(2), pp. 189–209.
- Khotimah, K & Muwahid. (2022). Keberadaan Partai Politik Sebagai Bentuk Pelembagaan Demokrasi, *Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 2(1), pp. 1–17.
- Miles, M. B., Huberman, A. M. & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. Fourth Edition, The SAGE Handbook of Applied Social Research Methods*.
- Noor, F. (2016a). Kegagalan Partai Politik Menarik Simpati Rakyat: Urgensi Sebuah Paradigma Baru Partai Politik. *Jurnal Penelitian Politik*, 4(1), pp. 49–57.
- Noor, F. (2016b). Perilaku Politik Pragmatis dalam Kehidupan Politik Kontemporer: Kajian Atas Menyurutnya Peran Ideologi Politik di Era Reformasi. *Masyarakat Indonesia*, 40(1), pp. 57–74.
- Noor, F. (2017). Evaluasi Kondisi Kepartaian 14 Tahun Reformasi Dalam Perspektif

- Pelembagaan Sistem Kepartaian. *Masyarakat Indonesia*, 38(2), pp. 221–250.
- Noor, F. (2018a). Partai Politik Sebagai Problem Demokrasi di Indonesia Era Reformasi: Kajian Penyebab dan Solusinya. *Orasi Pengukuhan Profesor Riset Bidang Politik Dan Pemerintah Indonesia* [Preprint].
- Noor, F. (2018b). Pilkada, Peran Partai dan Konstelasi Pragmatis: Kajian Atas Pilgub Banten, DKI Jakarta, Jateng dan Jatim Tahun 2017-2018. *Jurnal Penelitian Politik*, 15(2), pp. 179–196. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jpp.v15i2.759>
- Nurhasim, M. (2018). Koalisi Nano-Nano Pilkada Serentak 2018. *Jurnal Penelitian Politik: Konstelasi politik di tahun elektoral*. 15(2), pp. 129–142.
- Randall, V. & Sväsand, L. (2002). Party Institutionalization In New Democracies. *Party Politics*, 8(1), pp. 5–29. Available at: <https://doi.org/10.1177/1354068802008001001>
- Rasmussen, M. B. & Knutsen, C. H. (2021). Party institutionalization and Welfare State Development. *British Journal of Political Science*, 51(3), pp. 1203–1229.
- Refani, E. (2021). Urgensi Desentralisasi Partai Politik (Studi Kasus Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Kampar Periode Sisa 2017-2022). *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, 2(1), pp. 24–35. Available at: <https://doi.org/10.46730/japs.v2i1.17>
- Rodriguez, R. P. & Rosenblatt, F. (2020). Stability and incorporation: Toward a new concept of party system institutionalization. *Party Politics*, 26(2), pp. 249–260.
- Santika, E.F. (2023). Survei Indikator Politik Atas Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga, TNI Masih Memimpin, databoks. Available at: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/02/survei-indikator-politik-atas-kepercayaan-masyarakat-terhadap-lembaga-tni-masih-memimpin> (Accessed: 25 October 2023).
- Sari, I. N. et al. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. UNISMA PRESS.
- Sobari, W. (2020). Logika Politik Transaksional Petahana Dalam Pilkada: Analisis Pembelahan Politik. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 2, pp. 13–24. Available at: <https://doi.org/10.55108/jkp.v1i2.167>
- Solikhin, A. (2017). Menimbang Pentingnya Desentralisasi Partai Politik di Indonesia. *Journal of Governance*, 2(1), pp. 1–30. Available at: <https://doi.org/10.31506/jog.v2i1.2120>
- Sugiarto, E. (2015). *Menyusun Proposal Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media [Preprint].
- Suryana, W. (2023). Survei Indikator: Kepercayaan Publik ke Parpol Konsisten Paling Rendah, REPUBLIKA. Available at: <https://news.republika.co.id/berita/rtxgas330/survei-indikator-kepercayaan-publik-ke-parpol-konsisten-paling-rendah> (Accessed: 25 October 2023).
- Wahid, M. (2017). Penguatan Pelembagaan Partai Politik Melalui Pilkada Serentak 2018: Sebagai Upaya Melahirkan Elit politik Yang Etis', in Irman (ed.) *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji*. Available at: https://repository.unimal.ac.id/3598/1/Proseding_Zulham.pdf#page=69